



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN NELAYAN
TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN DATI II TEGAL**

**(The Influences Of Fishermen's Education Degree
On Their Law Awareness In Having Demography
Administration At Kabupaten Dati II Tegal)**

Oleh :
INDARJA, SH
Dan Tim Peneliti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998

**Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro,
sesuai Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal
4 Agustus 1997 Nomor : 3157/PT09.H2/N/1997**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1.a. Judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan Nelayan Terhadap Kesadaran Hukum dalam memiliki Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dati II Tegal

(The Influences of Fishermen's Education Degree on Their Law Awareness in Having Demography Administration at Kabupaten Dati II Tegal)

- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Kategori : Pengembangan Ilmu
- 2. Pengusul/Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Indarja, SH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Nip/gol/pangkat : 131 689 628/III c/ Penata
 - d. Jabatan : Lektor Muda
 - e. Fakultas : Hukum
- 3. Susunan Tim Peneliti :
 - a. Ketua : 1 orang
 - b. Anggota : 4 (dua) orang
- 4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tegal
- 5. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
- 6. Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,-
- 7. Sumber biaya : Dana D I K Rutin Undip Tahun Anggaran 1997/1998



Menyetujui :
[Signature]

Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH
130 350 519

Semarang, 15 Januari 1998
Ketua Proyek Penelitian

[Signature]
Indarja, SH



Menyetujui :
[Signature]
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP
DR.dr. Satoto
NIP. 130 368 071

RINGKASAN

Nelayan sebagai warga negara Indonesia memerlukan perangkat hukum yang mengatur perihal tingkah laku, salah satunya adalah administrasi kependudukan, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK).

Kesadaran hukum diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku nelayan dalam memiliki administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilkan pola perilaku hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dati II Tegal, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (socio legal Research). Tingkat Pendidikan Nelayan dibedakan : Rendah, Sedang. Kesadaran Hukum indikatornya meliputi : Pengetahuan hukum, Pemahaman Hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkatan- kesadaran hukum yaitu Rendah, Sedang, Tinggi.

✓ Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah tingkat pendidikan nelayan mempengaruhi kesadaran hukum nelayan dalam memiliki administrasi kependudukan.

✓ Analisa Data, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan menggunakan tabel yang sederhana dan bila perlu menggunakan perhitungan statistik.

✓ Tingkat pendidikan nelayan mempunyai pengaruh terhadap kesadaran hukum dalam memiliki Administrasi Kependudukan, disamping faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin banyak yang memiliki administrasi kependudukan.

SUMMARY

Fishermen as naturalized Indonesian citizen need legal equipments that rule behaviour. One of them is population administration including residency cards, birth certificates, and family cards.

Law awareness was assumed to have significant influences on the fishermen's behaviour in the case of their possession of population administration. This happened because law awareness could directly result certain patterns of law behaviour.

This research was carried out at Kabupaten Dati II Tegal by using a socio-legal research approach. Their education levels were classified into low and medium. The indicators of law awareness comprised legal knowledge, legal comprehension, legal attitude and legal behaviour. These four indicators referred to the levels of their law awareness, those were low, medium and advanced.

The problems put forward here are whether the fishermen's education levels influence their law awareness to possess population administration.

The data, both the primair and the secundair, were analyzed qualitatively or quantitatively by utilizing simple tables and, at any time, statistical accounting if needed.

Besides other factors, the fishermen's education levels have some influences on the law awareness in the matter of having population administration. The higher their education levels, the more who possessed the population administration.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul : "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN NELAYAN TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN DATI II TEGAL".

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Kadit Sospol Tingkat I Jawa Tengah
- Bappeda Tingkat I Jawa Tengah
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal
- Camat yang wilayahnya digunakan sebagai sample penelitian.
- Para nelayan, sebagai responden dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara khususnya.

Semarang, Januari 1998

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Perilaku hukum	4
B. Tingkat Sosial	6
C. Fungsi Hukum	10
D. Kesadaran Hukum	13
D. Administrasi Kependudukan	18
BAB III. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN	23
A. Tujuan Penelitian	23
B. Kontribusi Penelitian	23
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Pendekatan Masalah	25
B. Hipotesis	25
C. Variabel	25
D. Definisi Operasional	26
E. Sampling	27
F. Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data	28
H. Analisa Data	28

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Persetujuan Nelayan dengan adanya KTP ..	29
B. Nelayan yang Memiliki Kartu Tanda Pen duduk (KTP).....	30
C. Persetujuan Nelayan terhadap adanya Kar- tu Keluarga	30
D. Nelayan yang Memiliki Kartu Keluarga ...	31
E. Persetujuan nelayan dengan adanya Akta Kelahiran	32
F. Nelayan yang Memiliki Akta Kelahiran ...	33
G. Pengaruh Tingkat Pendidikan Nelayan Tehadap Kesadaran Hukum Dalam Memiliki Administrasi Kependudukan	36
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesada- ran Hukum Dalam Memiliki Administrasi Kependudukan Nelayan Di Kabupaten Dati II Tegal	44
 BAB VI. PENUTUP	 49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	 52
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : RESPONDEN YANG SETUJU TERHADAP KEWA- JIBAN MEMILIKI KTP.....	29
TABEL 2 : RESPONDEN YANG TELAH MEMILIKI KTP.....	30
TABEL 3 : RESPONDEN YANG SETUJU ADANYA KARTU KE- LUARGA.....	31
TABEL 4 : RESPONDEN YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA..	32
TABEL 5 : RESPONDEN YANG SETUJU ADANYA AKTA KE- KELAHIRAN.....	32
TABEL 6 : RESPONDEN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN..	33
TABEL 7 : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI KTP.....	36
TABEL 8 : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI KARTU KELUARGA.....	39
TABEL 9 : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nelayan sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan atau pedoman perihal tingkah laku untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Patokan atau pedoman itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah selalu berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang tata cara berperilaku di dalam masyarakat, menegaskan secara nyata-nyata model kelakuan mana yang seharusnya diturut dan/atau model kelakuan mana yang pula seharusnya di jauhi atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana orang tak lagi diijinkan berbuat.

Tingkat pendidikan nelayan Kabupaten Dati II Tegal yang relatif berbeda, yaitu ada nelayan yang memiliki pendidikan rendah ada nelayan yang memiliki pendidikan sedang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi mereka dalam berperilaku hukum sehingga ada kesadaran hukum untuk memiliki administrasi Kependudukan. Hal ini penting karena kondisi alam serta lingkungan masyarakat nelayan yang kebanyakan bersifat heterogen.

Kesadaran hukum diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilkan pola perilaku hukum tertentu. Atau dapat dikatakan, kesadaran

hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia.

Terbentuknya sikap /perilaku hukum akan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dalam hal ini adalah lingkungan sosial dan kebudayaan memberikan pengaruh yang relatif besar terhadap masing-masing individu nelayan, sehingga lingkungan sosial yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku / perilaku hukum yang berbeda pula. Salah satunya adalah tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam memiliki administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan administrasi tentang surat-surat keterangan mengenai keadaan seseorang yang berisi identitas atau keterangan mengenai status seseorang. Administrasi kependudukan dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran bagi yang mempunyai anak. Kartu Keluarga (KK). Surat-surat tersebut penting dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan, terutama bila seseorang akan mengurus kepentingan ke pada instansi pemerintah karena suatu urusan. Administrasi kependudukan secara pribadi wajib dimiliki oleh seseorang.

Dengan beragamnya pendidikan para nelayan di Kabupaten Dati II Tegal tentu akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dalam memiliki administrasi kependudukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan masalah :

- 1. Apakah tingkat pendidikan Nelayan di Kabupaten Dati II Tegal mempengaruhi kesadaran hukum untuk memiliki Administrasi Kependudukan.**

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi nelayan dalam memiliki administrasi kependudukan.